

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Tantangan dan Peluang Keamanan dan Ekonomi Era Jokowi

Dwi Ardiyanti

Ilmu Hubungan Internasional – Universitas Potensi Utama
ardiyanti.1987@gmail.com

Abstract

With its potential wealth in the sea and its position in the international business sea-line, Indonesia should display the maritime strength. Jokowi's vision to make Indonesia one of the maritime axis in the world has been embodied clearly by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Yet, the challenge and opportunities to become international maritime axis should be handled appropriately. Located in international business transit between Pacific and Indian Ocean, Indonesia is prone to criminals of drugs smuggling from/to Indonesia as well as the asylum seekers. This research attempts to analyze the Indonesia's challenges and opportunities in Jokowi's era with his vision to become the international maritime axis.

Keywords: Jokowi, Indonesia, international maritime axis, economy, security

Abstrak

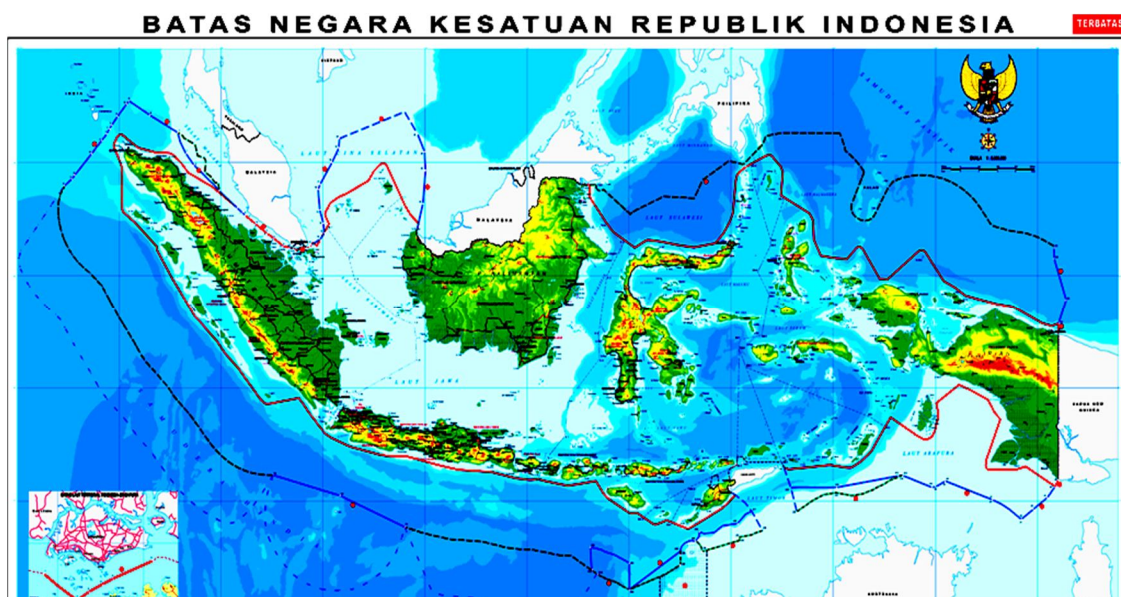
Dengan potensi kekayaan laut yang luar biasa dan posisinya yang berada di jalur laut bisnis internasional, Indonesia perlu memperlihatkan potensi maritimnya. Visi Jokowi menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia dijawab dengan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, tantangan dan ancaman untuk menjadi poros maritim dunia harus dijawab dengan baik. Indonesia yang berada di posisi transit bisnis internasional antara samudra Pasific dan Hindia berpotensi terhadap penyelundupan narkoba dari/ke Indonesia maupun para pencari suaka. Penelitian ini akan menganalisa tantangan dan ancaman Indonesia di era Jokowi dengan visinya untuk menjadi salah satu poros maritime dunia.

Kata kunci: Jokowi, Indonesia, poros maritim dunia, ekonomi, keamanan

Latar Belakang

Sesuai dengan paparan Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, jumlah pulau Indonesia lebih dari 17.500 meliputi wilayah laut yurisdiksi nasional lebih kurang 5,8 juta km², Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di perdagangan internasional. Letak geografis yang

mendukung, yaitu pada benua Asia dan Australia serta persilangan samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia merupakan urat nadi perdagangan dunia.



Visi Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pembangunan “*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*” memberikan harapan dan mengembalikan semangat membangun maritim dengan memanfaatkan sumber daya alam kelautan. Misi pemerintah untuk mencapai visi tersebut antara lain: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan keberibadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tiga dari tujuh misi tersebut berhubungan dengan maritim dan posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Forum Rektor Indonesia, 2015).

Posisi Indonesia ini telah dicantumkan dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan mengukuhkannya ke dalam UU RI No 17 tahun 1985. Langkah ini sangat penting

untuk menegaskan posisi yurisdiksi Indobesia di mata dunia dan akan melakukan tindakan sesuai dengan ratifikasi UU RI. No. 17 tahun 1985 jika diperlukan penanganan serius dalam melaksanakan hak dan kewajiban mengatur, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan laut nasional untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Indonesia dalam hal ini tidak hanya mampu menjadi sumber perdagangan yang potensial namun juga menjadi poros maritim dunia.

Kekuatan Indonesia di Bidang Kelautan

Lagu “nenek moyang seorang pelaut” seperti menghentak semangat warga negara Indonesia untuk mengingatkan kembali bagaimana para nenek moyang tersohor dengan bakatnya di bidang kelautan. Dalam era kepemimpinan Jokowi, hal ini juga menjadi momen penting untuk melihat kembali ke belakang bahwa Indonesia mampu bersaing dan bahkan unggul di bidang kemaritiman berbekal kekuatan dan pengalaman masa lampau.

Indonesia dengan kejayaan masa lampainya sudah memperkenalkan diri secara internasional melalui perdagangan dengan Cina, India, Arab, bahkan sampai negara Eropa (Yulianti, 2014, p.129). Dengan sepertiga bagian dunia yang terdiri dari kelautan dan dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, Indonesia semakin mantap melangkah menjadi poros maritim dunia. Didukung dengan gaya kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden yang “fenomenal” sebagai sorotan dunia internasional, Indonesia terus optimis untuk maju ke dunia internasional dan menonjolkan bidang kemaritimannya. Namun, optimisme serta potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia tidak akan ada artinya jika tidak didukung dengan kebijakan matang baik di dalam maupun luar negeri.

Di laut, kekayaan melimpah Indonesia sebagai penghasil minyak juga dibuktikan. Dengan cadangan minyak yang cukup besar, Indonesia juga merupakan negara pengekspor minyak dunia, bahkan masuk dalam OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Country). Hal ini dikarenakan posisi laut Indonesia yang strategis dilihat dari arus lautnya.

Alam Indonesia sangat luas dan kaya. Dalam hal kekayaan laut, Indonesia sudah tidak diragukan lagi potensinya. Dengan potensi alam sebesar itu, Indonesia menghadapi masalah pencurian kekayaan biota laut oleh kapal asing, sehingga

dibutuhkan ketegasan dan kekuatan militer untuk mengatasi hal tersebut. Seperti dalam tulisan Rakhmindyarto dan Wesley F. Sinulingga (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan), Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan terdapat potensi peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 25 triliun rupiah per tahun yang belum dimanfaatkan dari sumber daya ikan dan sumber daya non ikan. Tercatat 70 persen produksi minyak dan gas nasional berasal dari wilayah pesisir dan lautan, produksi perikanan tangkap Indonesia berada di peringkat 2 dunia pada tahun 2012, dan luas terumbu karang Indonesia sebesar 85.000 km.

Kekayaan sumber daya alam di laut sangat disayangkan jika tidak diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan dalam negeri dan luar negeri Indonesia harus bersinergi untuk membangun pasar internasional dan domestik guna memajukan perekonomian Indonesia. Semua ini bergantung pada bagaimana implementasi kebijakan dalam negeri untuk menarik investasi asing serta implementasi kebijakan otonomi daerah untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Kekuatan dan Peluang di Era Jokowi : Cita-Cita Mengejar Dunia

Era kepemimpinan Jokowi pasca terpilih menjadi Presiden Indonesia membawa semangat baru. Dengan kepercayaan diri yang mengutamakan kemajuan dan pembangunan di segala bidang, Jokowi masih terus mengobarkan semangat bahwa Indonesia mampu bersaing secara internasional.

Pemerintahan Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka paling tidak Indonesia harus memiliki kekuatan di beberapa bidang kelautan yang mendukung, antara lain keuangan dan regulasi kuat di bidang kelautan seperti negara Inggris, komunikasi Sea Lines of Communications/ SLOCs seperti Amerika Serikat, Korea Selatan dengan industri galangan kapal dunia, Denmark dengan kapasitas kapal kontainer global melalui Maersk Group, dan Singapura yang merupakan operator pelabuhan terbesar di dunia (BAPPENAS, 2015).

Oleh karena itu, menjadi poros maritim dunia merupakan sebuah pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Indonesia sedang berproses untuk mengoptimalkan

pengolahan sumber daya alam kelautan melalui berbagai perbaikan infrastruktur dan perbaikan regulasi. Kekayaan laut Indonesia melimpah dan mampu menjadi kekuatan ekonomi di bidang kemaritiman, misalnya ikan, minyak bumi, mutiara, bahkan pariwisata bawah laut. Berbagai potensi ekonomi di bidang kemaritiman dapat dioptimalkan pemanfaatannya hanya jika ada kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya.

Laporan dari Rakhmindyarto dan Wesly F. Sinulingga, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha, yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta ha pada tahun 2020. Pendapatan dari turis mancanegara bisa didapatkan dari sektor pariwisata diantaranya dari pariwisata bawah laut yang mendunia dan seperti Bunaken (Sulawesi Utara), Raja Ampat (Papua Barat), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Namun, kekayaan laut Indonesia masih kurang untuk menjadi kekuatan poros maritim dunia, diperlukan lebih dari itu. Kekuatan infrastruktur yang maju dan modern untuk memperlancar distribusi barang melalui akses laut.

Indonesia yang berada di perlintasan perdagangan dunia, sangat diuntungkan dengan adanya industri yang memerlukan akses laut Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi mencanangkan konsep "*Poros Maritim*" dan "*Tol Laut*" untuk menyikapi berbagai tantangan maupun peluang kemaritiman Indonesia (Forum Rektor Indonesia, 2015). Pembangunan tol laut dan infrastruktur di beberapa pelabuhan maupun perbaikan regulasi untuk memperlancar distribusi barang di pelabuhan merupakan contoh implementasi keseriusan kebijakan Jokowi untuk membuat Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Regulasi dan infrastruktur adalah dua hal penting yang saling bersinergi dalam distribusi barang melalui jalur laut. Seperti diketahui, lamanya waktu *dwellling* (bongkar muat barang) di pelabuhan Indonesia merupakan salah satu kendala yang berakibat pada kenaikan harga barang hingga sampai di tempat tujuan. Ditambah, kasus perompakan di wilayah laut yang semakin meningkat dan tidak jarang diakhiri dengan drama penyanderaan Anak Buah Kapal (Dinarto, 2016).

Kapal asing yang berbendera negara lain juga tak jarang melakukan kasus pencurian ikan di laut dan diperlukan tindakan hukum yang tegas sebagai bentuk keseriusan kebijakan Jokowi demi menegakkan kedaulatan Indonesia dan menegaskan posisi sebagai poros maritim dunia. Salah satunya adalah contoh ketegasan menteri Susi Pudjiastuti yang menangkap Kapal Vietnam (Sindonews, 20 Februari 2017). Langkah ini merupakan koordinasi yang baik antara Jokowi, Menteri KKP yaitu Menteri Susi Pudjiastuti, dan pihak militer yang kembali berencana untuk menenggelamkan 90 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia bulan Oktober (Tempo, 12 September 2017). Berdasarkan paparan dari Prof. Herry, Rektor IPB dalam acara Konvensi Kampus XI Forum Rektor Indonesia Medan, 23 Januari 2015; bahwa pencurian biota laut (*illegal fishing*) merugikan negara Indonesia sebesar 300 triliun rupiah Per tahun.

Tantangan yang harus dihadapi adalah adanya berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tegas misalnya dalam praktik penenggelaman kapal yang dicekal karena melakukan tindakan pencurian biota laut Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan dan diplomasi Jokowi harus tegas untuk menolak berbagai tindakan pencurian ilegal, meski harus berurusan dengan pemerintahan luar negeri.

Di sisi lain, ketegasan pemerintahan Jokowi membawa tantangan bagi negara asing yang sudah mencuri ikan Indonesia selama bertahun-tahun, misalnya dengan aksi tegas dari Menteri KKP yang menenggelamkan kapal dari Vietnam (144 kapal), Filipina (76 kapal), Malaysia (50 kapal), Thailand (21 kapal), Papua Nugini (2 kapal), Cina (1 kapal), serta Belize (1 kapal) yang berusaha masuk ke perairan Indonesia secara ilegal (Tempo.com, 12 September 2017). Hubungan diplomatik dan ekonomi antar negara harus kembali dibicarakan demi melakukan penanganan serius terhadap berbagai tindak pencurian ikan berbendera asing, meski tak jarang yang dipakai adalah anak Buah Kapal dari Indonesia. Diplomasi Jokowi di satu sisi, berusaha untuk mendapatkan investasi asing, namun di sisi lain harus tegas terhadap tindakan pencurian oleh kapal berbendera asing. Dengan begitu, kebijakan luar negeri Jokowi tidak lagi hanya bertumpu pada pemasukan investasi asing, namun juga penegakan kedaulatan di wilayah laut, pesisir, dan perbatasan Indonesia.

Kekayaan laut Indonesia merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat yang tinggal di pesisir. Seperti yang terdapat dalam tulisan Rakhmindyarto dan Wesley F. Sinulingga, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Statistik Perikanan dan Akuakultur Tahun 2012 dari *Food and Agriculture Organization (FAO)*, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga tercatat sebagai negara kedua terbanyak dalam hal jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor perikanan tercatat menampung 2.748.908 tenaga kerja pada tahun 2012. Para nelayan dan masyarakat yang mengandalkan perekonomian dari kekayaan laut berharap banyak pada kebijakan Jokowi dalam hal ekonomi berbasis maritim.

Perbaikan di segala bidang dan koordinasi yang baik antar instansi pemerintahan merupakan tombak dari kebijakan di bidang kelautan. Pemerintahan Jokowi optimis bahwa Indonesia di bawah naungannya mampu menjadi salah satu poros maritim dunia.

Kepercayaan Diri Indonesia di Poros Maritim Dunia

Kepercayaan diri Indonesia tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan kerja keras dan kerja sama antar dinas dan kementerian, begitu juga dengan pemerintahan daerah untuk mengimplementasikan kebijakan dalam negeri yaitu memperbaiki infrastruktur dan membangun Indonesia dari wilayah kelautannya.

Perbaikan infrastruktur telah digagas sejak era pemerintahan di masa lalu. Namun untuk membangun infrastruktur berbasis di bidang kelautan, terpilihnya Presiden Jokowi merupakan tonggak besar sejarah yang mungkin akan mengulangi kejayaan nenek moyang Indonesia di masa lampu dalam hal kepiawaian mengolah dan menaklukkan laut. Berikut ini adalah posisi Indonesia di mata dunia dalam hal nilai ekspor ikan (USD).

Satuan: 1.000 US\$

Unit: 1.000 US\$

No	Negara - Country	Tahun - Year				
		2005	2006	2007	2008	2009
	Jumlah - Total	78 630 105	86 086 721	93 574 627	101 983 273	na
1	China	7 519 357	8 968 051	9 250 710	10 114 324	na
2	Norway	4 885 226	5 503 429	6 228 123	6 936 644	na
3	Thailand	4 494 183	5 266 742	5 708 849	6 532 404	na
4	USA	4 232 041	4 143 146	4 436 746	4 463 052	na
5	Denmark	3 685 243	3 986 519	4 128 359	4 601 250	na
6	Viet Nam	2 756 139	3 372 242	3 783 834	4 550 333	na
7	Canada	3 595 693	3 659 857	3 711 890	3 706 192	na
8	Chile	2 966 917	3 556 594	3 677 002	3 930 969	na
9	Netherlands	2 820 138	2 811 705	3 280 643	3 394 073	na
10	Spain	2 579 057	2 848 676	3 230 749	3 465 473	na
11	Russian Federation	1 953 280	2 120 737	2 363 830	2 618 539	na
12	Germany	1 501 355	1 821 893	2 275 251	2 471 703	na
13	United Kingdom	1 871 900	1 940 004	2 162 101	2 119 563	na
14	Indonesia	1 797 948	1 957 068	2 100 872	2 473 388	na
15	Iceland	1 783 382	1 811 742	2 028 480	2 089 493	na
16	Lainnya	30 188 246	32 318 316	35 207 188	38 515 873	na

Sumber - Source: Yearbook, FAO November 2010

Keterangan:

na: not available - data belum tersedia

Indonesia menempati posisi ke-14 dalam hal nilai ekspor perikanan dunia. Hal ini didukung dari geo-ekonomi Indonesia yang strategis diantara lintas samudera dan lintas benua, sehingga potensi biota laut seperti ikan layak menjadi negara penghasil ikan dunia. Dengan wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, pemerataan pembangunan sangat penting, mengingat ada banyak warga negara Indonesia yang mengandalkan ekonomi kelautan.

Di wilayah perbatasan, misalnya Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang harus dibangun dan diperbaiki karena wilayah ini merupakan batas Indonesia dengan negara Australia, Timor Leste dan merupakan perbatasan langsung dengan Samudera Pasifik (Tempo.co, Rabu 17 Mei 2017). Dalam pernyataan yang dimuat tersebut Antropolog Budaya dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD PhD menyatakan bahwa "Bahkan Indonesia Timur menjadi incaran karya misi pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi,". Neonbasu mencontohkan, kebutuhan air baku untuk memenuhi hajat hidup masyarakat sehari-hari maupun sektor pertanian telah didukung dengan hadirnya pembangunan bendungan-bendungan besar seperti Tilong, Raknamo, Rotiklot di Pulau Timor, serta dialokasikan pula untuk Pulau Flores dan Sumba.

Pembangunan infratraktur terutama di wilayah pelabuhan dan laut akan memperlancar jalur distribusi barang dari Jawa ke wilayah Timur, sehingga dapat menekan harga. Masyarakat di wilayah pesisir juga mampu mengandalkan potensi kelautan yang lain, misalnya di bidang pariwisata. Oleh karena itu, dukungan dari dana dan kebijakan yang mampu menyusun anggaran dengan tepat guna sangat dibutuhkan demi mencapai kesejahteraan yang merata di segala bidang dan daerah.

Masuknya investasi asing untuk pembangunan di Indonesia tentu akan menimbulkan pengaruh, terutama bagi mereka yang ada di daerah akan lebih sering bersentuhan dengan orang asing, terutama jika pembangunan difokuskan dalam bidang pariwisata. Daya tarik alam yang didukung dengan peningkatan infrastruktur akan mampu menjadikan Indonesia sebagai objek wisata dunia. Kemudian kesiapan masyarakat daerah dalam menerima perubahan akan menjadi fokus dari implementasi kebijakan yang lain. Masyarakat daerah mau tidak mau harus melakukan penguatan, antara lain di bidang ekonomi dan budaya. Dengan semakin banyaknya turis asing ke daerah, akan mampu meningkatkan perekonomian daerah, maka pemerintah daerah juga diharapkan memberikan pengetahuan dan pelatihan ekonomi berbasis kearifan lokal.

Kearifan lokal juga harus didukung dengan kesiapan mental masyarakat lokal untuk "bersentuhan" dengan budaya yang datang bersama turis asing. Oleh karena itu, fokus dari kebijakan bidang kemaritiman Jokowi adalah pendekatan yang sinergis antara budaya, dengan cara prioritas pembangunan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Seperti yang dimuat dalam situs kemendes.go.id bahwa dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan kerja Pemerintahan Jokowi-JK, telah diupayakan pencapaian target terentaskannya daerah-daerah tertinggal yang tersebar di 122 kabupaten, dimana pada tahun 2016 ini telah dicapai pengentasan dari 17 kabupaten daerah tertinggal, diantaranya 3 (tiga) kabupaten daerah tertinggal yang berada di perbatasan. Pengentasan daerah tertinggal tersebut, diukur dalam 3 (tiga) indikator utama, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan, dimana dalam 2 (dua) tahun terakhir ini telah menunjukkan peningkatan IPM di seluruh 122

daerah tertinggal, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 51 kabupaten daerah tertinggal, dan penurunan angka kemiskinan pada 112 kabupaten daerah tertinggal.

Diplomasi Jokowi yang menekankan pendekatan ke masyarakat yang tinggal di wilayah 3 T masih terus dilakukan demi pemerataan pembangunan di Indonesia. Melalui jajaran kementerian dan militer, pendekatan yang cerdas sangat penting, mengingat masyarakat daerah sensitif dengan sentuhan modernisasi dan kebudayaan asing yang lambat laun akan bersentuhan dengan mereka. Jokowi berhasil melihat akar masalah pemerataan pembangunan dan bekerja melalui gaya diplomasi yang bersumber pada sektor vital pembangunan di wilayah 3T.

Tantangan dan Peluang Maritim Indonesia: Arus Perdagangan Dunia Melalui Laut Indonesia

Indonesia sampai saat ini masih menghadapi tantangan di bidang keamanan kelautan. Dalam hal tata kelola dan pengamanan akses laut Indonesia diatur dalam UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Namun dalam prakteknya di lapangan terdapat masalah teknis yang memerlukan penanganan lebih teliti.

Berdasarkan amanah UU Nomor 32 Tahun 2014, Bakamla (Badan Keamanan laut) berkewajiban melaksanakan fungsi di bidang keamanan. Di sisi yang lain, TNI-AL berkewajiban melaksanakan fungsi dibidang pertahanan sesuai dengan amanah UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 58 ayat (1) dan (2). TNI mengemban kewajiban, sebagai berikut (Dinarto, 2016):

Pasal 58 ayat (1). Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Pasal 58 ayat (2). Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Kemudian, pengamanan maritim menjadi tantangan sendiri dan kadang terjadi gesekan antara TNI - AL dan Bakamla (Badan Keamanan Kelautan), di mata TNI penegakan hukum di laut menjadi kewenangan TNI-AL berada di tangan mereka. Namun, menurut Mantan Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal (Purn.) Agus Widjojo, hal ini tidak sepatutnya terjadi. Menurut ia masih terdapat kesalahpahaman bahwa persoalan keamanan maritim berada di

tangan TNI-AL, yang mana secara kontradiktif bahwa keamanan maritim adalah fungsi penegakan hukum di perairan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga penegakan hukum sipil (Widjojo, 2015; Dinarto, 2016). Dari segi pengamanan operasi di laut, banyak terjadi gesekan antara penegak hukum di laut. Bakamla juga memiliki persoalan dengan lembaga penegakan hukum di laut lainnya, seperti Polisi Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasalnya, lembaga di atas menjalankan fungsi patroli secara bersamaan, sehingga menyebabkan tumpang-tindih kepentingan di wilayah yurisdiksi Indonesia (Dinarto, 2016). Sehingga, Presiden Jokowi meminta para kementerian untuk berkoordinasi guna meningkatkan pengamanan di laut.

Koordinasi dalam hal ini masih mengalami kendala terkait kepentingan masing-masing institusi pemerintahan demi menyelamatkan aset bangsa di laut. Ketegasan dalam pengamanan militer untuk menindak para penangkap ikan ilegal dari negara lain sangat penting meskipun dalam praktiknya hal tersebut justru menimbulkan gesekan operasional antar institusi pemerintah.

Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke membutuhkan banyak perhatian, terutama di bidang pengamanan. Oleh karena itu, pada era pemerintahan Jokowi, pembangunan difokuskan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Indonesia juga menjadi salah satu wilayah transit para imigran gelap yang ingin bertolak ke Australia. Seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, Indonesia membangun wilayah Timur (Kupang) dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut adalah perbatasan langsung dengan negara Australia. Oleh karena itu, Indonesia harus menyiapkan kekuatan militer demi keamanan dan menjaga wilayah Indonesia.

Kesiapan bidang infrastruktur harus didukung dengan kekuatan militer, mengingat Luas negara Indonesia yang mencapai 5,8 juta km² yang terdiri dari 3,1 juta km² perairan dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Luas perairan Indonesia sebesar 70 persen dari total luas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tol laut yang dicanangkan oleh pemerintah sangat dibutuhkan

untuk mendukung kebijakan Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Newswantara, 3 Oktober 2016).

Dengan mempertimbangkan rumitnya masalah yang di sekitar Perairan Indonesia, dibutuhkan kerjasama dan tindak tegas dari pemerintah dan jajaran di bawahnya untuk mengimplementasikan kebijakan demi kedaulatan wilayah Indonesia. Masalah pengelolaan wilayah laut Indonesia sangat kompleks, tidak hanya tentang eksplorasi kekayaan laut Indonesia, perompakan, penyelundupan, waktu *dwelling* (bongkar muat kapal), regulasi kebijakan cukai, hingga masalah ketimpangan di wilayah pesisir menyebabkan usaha pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim masih terus diupayakan.

Perbaikan regulasi dan infrastruktur di pelabuhan Indonesia masih terus diupayakan. Dengan dibangunnya kawasan pelabuhan strategis berstandar internasional di Sabang, Indonesia yakin bahwa pendapatan devisa akan meningkat dari sektor perdagangan laut. Namun, pelabuhan berstandar di kawasan Sabang tersebut belum bekerja secara optimal dan masih dalam tahap pengembangan.

Langkah positif ini merupakan sebuah babak baru dalam dinamisnya kebijakan Jokowi yang mengutamakan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya di area perbatasan seperti Sabang. Kawasan Sabang memiliki posisi geografis yang strategis bagi jalur perdagangan dan pelayaran internasional antara Kawasan Asia Pasifik dan Asia Barat Daya. Pelabuhan Sabang mencapai kedalaman 22 meter dan siap untuk menerima kedatangan kapal raksasa di masa depan. Kawasan sabang bisa dijadikan sebagai pintu masuk Selat Malaka. Kawasan ini dilalui rata-rata 50,000 kapal kontainer dan sekitar 50,000 kapal 'pedagang besar' lewat selat ini setiap tahunnya (Newswantara, 3 Oktober 2016).

Kesimpulan

Indonesia dengan berbagai potensi sumber daya alam baik di darat maupun di laut tengah berusaha menciptakan babak baru dalam ekonomi internasional. Melalui gaya diplomasi Jokowi, Indonesia berkesempatan menggapai cita-cita melalui visi misi pembangunan yang merata dan mencapai tujuan menjadi poros maritim dunia. Langkah ini memerlukan koordinasi dan implementasi kebijakan yang mengedepankan pemerataan pembangunan di segala bidang, terutama di wilayah

3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Diplomasi Jokowi merupakan fokus dalam penelitian ini, dengan bersumber pada kekayaan sumber daya alam dan kekuatan kelautan, Jokowi yakin bahwa Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Namun, perbaikan regulasi dan infrastruktur akan menjadi tantangan lain dalam implementasi kebijakan dalam negeri.

Visi dan misi Jokowi dalam membangun Indonesia dari wilayah 3T dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian. Dengan posisi strategis Indonesia, merupakan keuntungan dalam bisnis internasional yang membutuhkan akses laut Indonesia. Namun, dibalik potensinya, Indonesia menghadapi banyak tantangan diantaranya tantangan dari perompak di laut, keamanan di laut, arus imigran yang menggunakan akses laut. Semua itu mengandalkan langkah diplomasi Jokowi sebagai presiden RI yang harus melakukan pendekatan pembangunan yang cerdas dan sinergis dengan visi misi pemerintahannya.

Daftar Pustaka

- Dinarto, Dedi Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo.pdf <https://www.researchgate.net/publication/309726899> diakses pada 22 September 2017
- Rakhmindyarto dan Sinulingga, Wesly F. (2016). *Ekonomi Biru Untuk Maritim Indonesia Yang Berkelanjutan*.
- Yuliati. (2014). Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 27. Nomor 2.
- Institute for Maritime Studies Sejarah maritim indonesia: Meretas sejarah, Menegakkan martabat bangsa Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh Forum Rektor Indonesia. Naskah Akademik. 2015.
- Tempo.co. Antropolog Puji Jokowi Pembangunan Sentuh Wilayah Timur Indonesia <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/17/078876070/antropolog-puji-jokowi-pembangunan-sentuh-wilayah-timur-indonesia> diakses pada 22 September 2017
- Kemendesa <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/161027/262-pendekatan-kesejahteraan-untuk-membangun-daerah-tertinggal--terdepan-dan-terluar> diakses pada 22 September 2017
- Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim: Beberapa Catatan IPB Konvensi Kampus XI Forum Rektor Indonesia. 2015
- Tata kelola keamanan laut Indonesia Dalam mendukung program Pengembangan poros maritim Dunia Oleh: Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc.

- Universitas Pertahanan Indonesia . Pertemuan Forum Rektor Indonesia 2015.
Medan, 24 Januari 2015 Kampus Universitas Sumatera Utara
- Tempo/.co. Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim. Edisi Kamis, 13
November 2014
- Abrian, Gerry .Newswantara. Memahami Posisi Indonesia Pada Jalur Perdagangan
Internasional edisi 3 Oktober 2016
- Hasyim, Irsyan .Tempo: Menteri Susi Akan Tenggelamkan 90 Kapal Asing pada
Oktober edisi Selasa, 12 September 2017
- Deputi Bidang Kemaritiman Dan Sumberdaya Alam. Kementerian perencanaan
Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS) Januari 2016: Ringkasan Prakarsa Strategis Optimalisasi
Pemanfaatan Potensi Kelautan Menuju Terwujudnya Indonesia Sebagai poros
maritim 2015
- Ashab, Muhammad Bunga.Tiga Kapal Vietnam Mencuri Ikan Gunakan Bendera
Malaysia. Koran Sindo edisi Jum'at, 14 Oktober 2016